



MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI SUBSTANTIF DINAMIS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK PEMUDA

Apriya Maharani Rustandi ^{1*}, Cecep Darmawan ², Karim Suryadi ³, Syaifullah ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat

Corresponding Author: apriyamaharani@upi.edu*

Article Info

Article history:

Received : 24 April 2026

Acceptance : 30 April 2026

Published : 30 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Rustandi, A.M., Darmawan, C., Suryadi, K., Syaifullah (2024). MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI SUBSTANTIF DINAMIS DALAM KONTEKS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK SUBSTANTIF PEMUDA. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 84-94.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

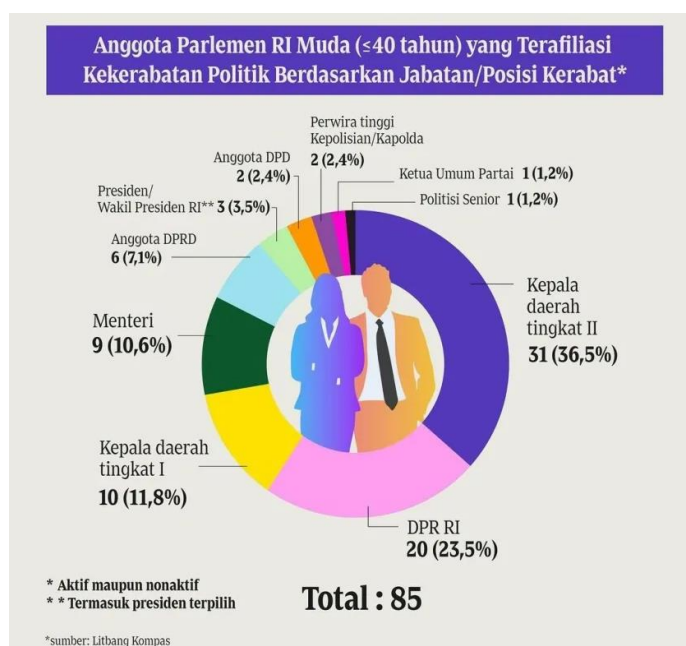
ABSTRAK

Pemuda merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam ranah politik. Namun, partisipasi politik pemuda sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga atau dorongan finansial, sehingga menimbulkan keraguan terhadap tingkat kesadaran politik substantif mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi model pembelajaran pada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik substantif generasi muda. Model pembelajaran ini dikembangkan dengan pendekatan sintaks AKTIF, yang mengintegrasikan isu-isu kontemporer, seperti pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan urgensi partisipasi politik yang bermakna. Proses pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memahami nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui metode yang interaktif dan reflektif. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik yang berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan yang relevan dalam membangun generasi muda yang kritis, nasionalis, dan berintegritas.

Kata Kunci: Partisipasi politik pemuda, Pendidikan Kewarganegaraan, model AKTIF, pembelajaran interaktif.

1. PENDAHULUAN

Rendahnya kesadaran politik substantif di kalangan pemuda Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 35% pemuda Indonesia yang secara aktif terlibat dalam kegiatan politik bermakna, seperti advokasi kebijakan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat luas. Sebagian besar pemuda lebih condong pada bentuk partisipasi politik prosedural, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu, tetapi tanpa pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai politik substantif, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan akuntabilitas.



Gambar 1. Afiliasi Kekekerabatan Politik

Gambar diatas menunjukkan hubungan kekerabatan politik dari anggota parlemen muda Indonesia berusia 40 tahun ke bawah. Berdasarkan data, sebanyak 85 anggota parlemen muda memiliki kerabat dengan jabatan politik atau pemerintahan tertentu. Kategori terbesar berasal dari kerabat yang menjabat sebagai Kepala Daerah Tingkat II (bupati/walikota) sebanyak 36,5%, diikuti oleh kerabat DPR RI sebesar 23,5%, dan Kepala Daerah Tingkat I (gubernur) sebanyak 11,8%. Selain itu, ada pula yang memiliki hubungan dengan menteri, anggota DPRD, dan tokoh-tokoh politik lainnya. Data ini menggambarkan kuatnya peran politik keluarga dalam mengisi posisi parlemen muda di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kekerabatan politik masih menjadi faktor signifikan dalam perjalanan karier politik, terutama bagi generasi muda.

Fenomena politik uang dan dinasti politik turut memperburuk situasi. Studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa 41% pemuda yang aktif dalam politik bergabung karena insentif material atau pengaruh keluarga, bukan karena dorongan ideologis atau komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Akibatnya, banyak pemuda yang terjebak dalam praktik politik transaksional yang mengutamakan keuntungan pribadi daripada keberlanjutan nilai-nilai demokrasi.

Rendahnya kesadaran ini juga mencerminkan kurangnya penguatan nilai-nilai politik substantif dalam pendidikan (Dotutinggi, 2023), khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sebagian besar pembelajaran PKn masih bersifat konvensional, menekankan aspek prosedural seperti definisi demokrasi dan struktur pemerintahan, tetapi kurang mengeksplorasi dimensi substantif yang mencakup partisipasi bermakna, inklusi, dan pemberdayaan warga negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam model pembelajaran PKn untuk membangun kesadaran politik substantif di kalangan pemuda.

Pemuda merupakan elemen penting dalam pembangunan bangsa, terutama dalam upaya memperkuat demokrasi. Dalam konteks politik, partisipasi pemuda seharusnya menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan positif. Namun, berbagai survei menunjukkan bahwa partisipasi politik pemuda masih tergolong rendah dan cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2019 mencapai 55,3%, angka yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih dewasa. Sementara itu, survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 33% pemuda Indonesia yang aktif dalam kegiatan politik, seperti organisasi partai atau diskusi publik.

Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan pemuda yang cenderung pragmatis. Banyak dari mereka yang aktif dalam politik karena faktor kedekatan keluarga dengan pejabat atau iming-iming finansial, bukan atas dasar kesadaran politik substantif. Menurut survei yang dilakukan oleh Populi Center (2022), sebanyak 47% pemuda yang terlibat dalam kampanye politik mengaku melakukannya karena insentif materi. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme yang seharusnya menjadi landasan utama dalam partisipasi politik.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik substantif pemuda. Namun, pendekatan pembelajaran yang bersifat teoritis dan kurang relevan dengan isu-isu kontemporer menjadi tantangan tersendiri. Studi dari Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) mengungkapkan bahwa 62% siswa merasa pembelajaran PKn belum memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik aktual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan inovasi model pembelajaran PKn yang mampu meningkatkan kesadaran politik substantif pemuda. Inovasi ini tidak hanya menekankan pada pemahaman teori, tetapi juga pada keterlibatan aktif siswa dalam isu-isu politik yang relevan, seperti peran mereka dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan substansial.

Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran politik substantif pemuda. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas model tersebut dalam membangun pemahaman politik yang mendalam, kritis, dan relevan dengan tantangan demokrasi saat ini. Secara teoretis, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori pembelajaran berbasis kewarganegaraan, sementara secara praktis, memberikan panduan bagi pendidik untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berdampak nyata.

2. METODE

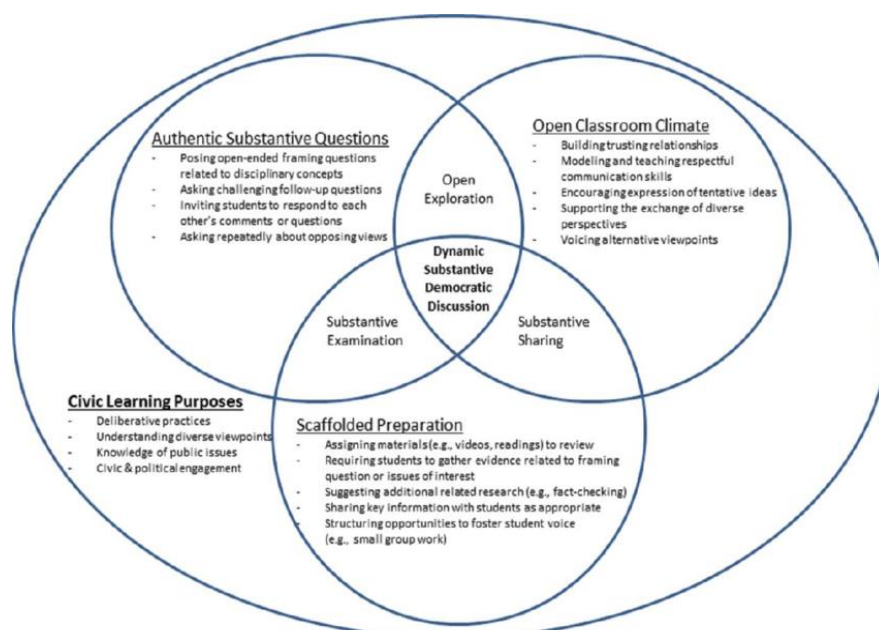
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk merancang sintaks pembelajaran berbasis AKTIF yang dirancang khusus guna meningkatkan kesadaran politik substantif di kalangan pemuda. Analisis kebutuhan dilakukan dengan meninjau relevansi politik substantif dalam konteks pembelajaran PKn, serta potensi penerapan metode interaktif yang mendorong partisipasi aktif siswa. Penelitian ini memanfaatkan data dari studi literatur terkait konsep politik substantif, strategi pembelajaran PKn, dan model pembelajaran inovatif yang relevan. Selain itu, data sekunder dari survei atau penelitian sebelumnya yang menyoroti tingkat kesadaran politik pemuda juga digunakan sebagai landasan untuk mendukung analisis dan perancangan sintaks. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang berbasis politik substantif dengan mengkaji tantangan dan peluang dalam pendidikan PKn. Selanjutnya, dilakukan penyusunan sintaks AKTIF yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pembelajaran interaktif dan kontekstual. Terakhir, sintaks yang dirancang divalidasi secara konseptual melalui tinjauan ahli pendidikan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Utama: Minimnya Politik Substantif

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemahaman politik di kalangan pemuda memang cenderung pragmatis dan berorientasi pada keuntungan pribadi. Penelitian Henn et al. (2002) menemukan bahwa bagi sebagian pemuda, politik dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, status, dan keuntungan material. Hal ini sejalan dengan temuan Cammaerts et al. (2014) yang mengidentifikasi adanya "political consumerism" di kalangan pemuda, di mana mereka terlibat dalam aktivitas politik untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan pemahaman politik yang pragmatis di kalangan pemuda antara lain: a. **Kondisi sosial-ekonomi:** Pemuda yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan cenderung melihat politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi (Furlong & Cartmel, 2007). b. **Pengalaman politik:** Pemuda yang memiliki pengalaman negatif dengan sistem politik, seperti korupsi atau ketidakadilan, dapat mengembangkan pandangan yang lebih skeptis dan pragmatis terhadap politik (Henn & Foard, 2014). c. **Pengaruh media dan lingkungan:** Paparan media dan lingkungan sosial yang menekankan pada kepentingan pribadi dapat membentuk pemahaman politik yang lebih individualistik di kalangan pemuda (Loader, 2007).



Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual untuk Mengajar dengan Diskusi Dynamic Substantive Democratic (DSD)

Gambar di atas menjelaskan Dynamic Substantive Democratic Discussion yang terdiri dari tiga komponen utama: Authentic Substantive Questions, Open Classroom Climate, dan Scaffolded Preparation. Ketiga elemen ini saling berhubungan untuk menciptakan diskusi yang mendalam dan demokratis. Pertanyaan substantif mendorong siswa berpikir kritis melalui pertanyaan terbuka, sementara iklim kelas yang terbuka membangun ruang aman untuk mengekspresikan pandangan berbeda. Selain itu, persiapan yang terstruktur memberikan siswa akses pada bahan belajar dan kesempatan untuk mengembangkan argumen berbasis bukti.

Minimnya politik substantif dalam pendidikan kewarganegaraan terjadi karena proses pembelajaran tidak berfokus pada analisis mendalam tentang isu-isu publik. Dengan menerapkan pendekatan ini, siswa dapat belajar mengeksplorasi perspektif yang beragam, memahami konteks sosial-politik, dan berdiskusi secara kritis dan berbasis fakta. Hal ini mendorong siswa tidak hanya memahami demokrasi secara formal, tetapi juga mengapresiasi nilai-nilai demokrasi yang berkaitan dengan keadilan dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemahaman politik di kalangan pemuda lebih berorientasi pada aspek-aspek prosedural, seperti cara memberikan suara, tanggal dan tempat pemungutan suara, dan mekanisme teknis lainnya (Ridha & Riwanda, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sosialisasi pemilihan umum cenderung memprioritaskan kesadaran teknis elektoral, sementara aspek substantif dari proses politik kurang mendapat perhatian (Ridha & Riwanda, 2020).

Sementara itu, beberapa referensi mengindikasikan bahwa kesadaran politik substantif, yaitu pemahaman akan peran dan tanggung jawab warga negara dalam sistem politik, masih kurang di kalangan pemuda (Himawati & Marwan, 2022; Sasana Tunggal, 2023). Pemuda cenderung melihat politik hanya sebagai sarana untuk memperoleh

keuntungan pribadi, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan public (Arom & Yuhan, 2021).

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan pemahaman politik prosedural di kalangan pemuda antara lain: a. Pengalaman politik negatif, seperti korupsi dan ketidakadilan, dapat membentuk pandangan yang lebih skeptis dan pragmatis terhadap politik (Arom & Yuhan, 2021) b. Paparan media dan lingkungan sosial yang menekankan pada kepentingan pribadi dapat membentuk pemahaman politik yang lebih individualistis (Arom & Yuhan, 2021). c. Kurangnya pendidikan politik yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan publik (Himawati & Marwan, 2022).

Pemahaman politik yang cenderung prosedural dan kurangnya kesadaran substantif di kalangan pemuda dapat menimbulkan beberapa implikasi dan tantangan, antara lain: a. Rendahnya partisipasi politik yang berorientasi pada kepentingan public (Ridha & Riwanda, 2020) b. Meningkatnya risiko korupsi dan nepotisme dalam sistem politik (Arom & Yuhan, 2021) c. Kesulitan dalam membangun konsensus dan solidaritas sosial yang diperlukan untuk perubahan positif (Arom & Yuhan, 2021). d. Tantangan dalam mendorong pemuda untuk terlibat dalam politik secara lebih substantif dan berorientasi pada kepentingan bersama (Himawati & Marwan, 2022).

Rancangan Sintaks AKTIF

Dampak Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Referensi menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inovatif dapat berdampak positif pada peningkatan kesadaran politik substantif di kalangan pemuda, antara lain: a. Meningkatnya pemahaman pemuda tentang peran dan tanggung jawab warga negara dalam sistem politik (Faqih et al., 2022; Novianti, 2023). b. Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam isu-isu kewarganegaraan dan politik (Alhadar et al., 2022; Hapsari et al., 2022). c. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah terkait politik (Kurniawan et al., 2023; Rinjani, 2022). d. Meningkatnya minat dan motivasi pemuda untuk terlibat dalam proses politik yang berorientasi pada kepentingan public (Fairuza et al., 2023; Isdendi et al., 2023).

Artikel ini memaparkan rancangan model AKTIF sebagai alternatif pembelajaran yang inovatif untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Setiap tahap sintaks dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap politik. Aktivasi di awal pembelajaran penting untuk menarik perhatian siswa, sedangkan kolaborasi memungkinkan mereka belajar dari perspektif yang berbeda. Melalui tindakan, siswa mendapatkan pengalaman langsung yang menguatkan konsep partisipasi politik, sementara tahap inovasi memberi ruang bagi pemikiran kritis. Feedback pada tahap akhir adalah evaluasi untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi.

1. Fase 1: Analisis Masalah

Tujuan: Mengidentifikasi dan memahami isu politik substantif.

- a. Guru menyajikan studi kasus atau masalah politik terkini (misalnya, isu pemilu, kebijakan publik, atau partisipasi pemuda).

- b. Siswa melakukan analisis awal untuk memahami masalah, mengidentifikasi aktor, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- c. **Aktivitas:** Diskusi kelompok kecil atau individual dengan panduan pertanyaan analitis.

2. Fase 2: Kolaborasi dalam Diskusi

Tujuan: Mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi dan kerja sama.

- a. Siswa dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan sudut pandang yang berbeda terkait masalah yang dianalisis.
- b. **Kelompok** memformulasikan solusi atau rekomendasi berbasis fakta.
- c. **Aktivitas:** Debat kelompok, simulasi parlemen, atau diskusi panel.

3. Fase 3: Tindakan Nyata

Tujuan: Mendorong keterlibatan aktif dalam politik substantif.

- a. Siswa merancang dan melaksanakan proyek kecil yang relevan dengan isu, seperti kampanye kesadaran, petisi online, atau forum diskusi masyarakat.
- b. **Proyek** ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman praktis tentang proses politik.
- c. **Aktivitas:** Penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

4. Fase 4: Integrasi Konsep

Tujuan: Menghubungkan pengalaman pembelajaran dengan teori dan konsep politik.

- a. Guru memfasilitasi refleksi terhadap aktivitas sebelumnya, mengaitkan hasil dengan teori politik dan nilai demokrasi.
- b. **Aktivitas:** Presentasi kelompok atau laporan tertulis yang mencakup temuan dan refleksi.

5. Fase 5: Feedback dan Evaluasi

Tujuan: Mengevaluasi pemahaman siswa dan efektivitas pembelajaran.

- a. Guru memberikan umpan balik terhadap laporan, presentasi, dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran.
- b. Siswa juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap model pembelajaran yang digunakan.
- c. **Aktivitas:** Evaluasi dengan rubrik yang mencakup aspek analisis, kolaborasi, kreativitas, dan implementasi tindakan.

Keunggulan Sintaks AKTIF

Model pembelajaran yang menggunakan sintaks **AKTIF** ini, dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep politik secara mendalam tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses politik yang nyata. Dengan mendorong keterlibatan langsung dalam isu-isu aktual, model ini meningkatkan relevansi pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari sekaligus membangun keterampilan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, dan rasa tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Keunggulan dari sintaks **AKTIF** ini diantaranya:

- a. Memadukan teori dan praktik sehingga siswa tidak hanya memahami konsep politik tetapi juga merasakan peran aktif dalam proses politik.
- b. Mendorong keterlibatan langsung dalam isu nyata, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
- c. Membangun kemampuan berpikir kritis, kerja sama, dan rasa tanggung jawab sosial.

Tabel 1. Perbandingan Model Pembelajaran Tradisional dengan Model Pembelajaran AKTIF

Aspek	Model Pembelajaran Tradisional	ACTIVE Learning Models
Approach	Teacher-centered.	Berpusat pada siswa (<i>student-centered</i>).
Metode	Lectures, memorization, and individual assignments.	Diskusi interaktif, proyek kelompok, debat, dan simulasi.
Keterlibatan Siswa	Students tend to be passive, only receiving information.	Siswa terlibat aktif dalam analisis, kolaborasi, dan tindakan nyata.
Tujuan Pembelajaran	Menekankan pengetahuan kognitif tanpa banyak aplikasi praktis.	Mengintegrasikan pengetahuan kognitif dengan keterampilan praktis.
Relevansi dengan Kehidupan Nyata	Materi sering bersifat teoritis dan kurang kontekstual.	Materi dikaitkan dengan isu politik aktual untuk meningkatkan kesadaran substantif.
Pengembangan Keterampilan	Fokus pada penguasaan konsep tanpa mendorong berpikir kritis atau kreatif.	Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kepemimpinan.
Evaluasi Pembelajaran	Berbasis ujian tertulis, menilai hafalan atau pemahaman konsep dasar.	Berbasis rubrik yang mencakup analisis, kreativitas, implementasi, dan refleksi.

Keterlibatan Sosial	Cenderung individu, jarang melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok atau masyarakat.	Memotivasi siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui proyek sosial.
----------------------------	--	--

Model pembelajaran AKTIF memiliki relevansi yang kuat dengan demokrasi modern, karena memungkinkan siswa memahami isu-isu politik aktual sekaligus mengasah peran mereka sebagai warga negara yang aktif. Pendekatan ini mengedepankan pembelajaran kontekstual, di mana siswa tidak hanya menghafal konsep politik tetapi juga belajar melalui pengalaman nyata, seperti simulasi atau proyek berbasis masyarakat. Dengan metode yang partisipatif dan interaktif, model ini mampu meningkatkan motivasi dan minat siswa karena relevansi materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, model AKTIF mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang meliputi *critical thinking*, *creativity*, *collaboration*, dan *communication* (4C), yang penting untuk menghadapi tantangan zaman. Evaluasi yang diterapkan juga bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih menyeluruh dan berdampak nyata.

4. KESIMPULAN

Model AKTIF ini menawarkan kerangka kerja baru yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik pemuda melalui pembelajaran interaktif dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun model ini belum diuji coba, rancangan ini memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan politik siswa saat ini. Uji coba selanjutnya diperlukan untuk mengetahui efektivitas model ini dalam meningkatkan keterlibatan politik pemuda di Indonesia.

REFERENSI

- Alhadar, S., Djunaidi, S. U., & Suleman, S. D. (2022). Peningkatan Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Akan Politik Pemerintahan Di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Abdidas*, 3(1), 165-170. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.554>
- Arom, N. F., & Yuhan, R. J. (2021). Penyusunan Indeks Kesadaran Politik Di Kalangan Mahasiswa. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 1192-1202. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.639>
- Furlong, A., & Cartmel, F. (2007). Young people and social change: New perspectives. McGraw-Hill Education (UK). *Behavioral Scientist*, 58(5), 645-664.
- Cammaerts, B., Bruter, M., Banaji, S., Harrison, S., & Anstead, N. (2014). The myth of youth apathy: Young Europeans' critical attitudes toward democratic life. *American*

- Dotutinggi, S., Rampi, R. C., Silingade, Y. S., & Panirogo, Y. (2023). Penguatan civic education dalam meningkatkan pengetahuan substantif elektoral politik pemilih pemula. *Jurnal Polahi*, 1(1).
- Fairuza, H., Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. N. (2023). Transformasi Political Awakening Perempuan: Komunitas Virtual Sebagai Wujud Peran Pemuda Melalui Platform Internet Sebagai Public Sphere Dalam Era Digital. *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia*, 4(2), 97-106. <https://doi.org/10.59784/glosains.v4i2.422>
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1809-1815. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>
- Hapsari, M. A., Wardhani, S. H. R., Ariyani, N., & Andani, D. (2022). Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta. *Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 105-117. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15180>
- Henn, M., & Foard, N. (2014). Social differentiation in young people's political participation: the impact of social and educational factors on youth political engagement in Britain. *Journal of Youth Studies*, 17(3), 360-389.
- Henn, M., Weinstein, M., & Wring, D. (2002). A generation apart? Youth and political participation in Britain. *The British Journal of Politics and International Relations*, 4(2), 167-192.
- Himawati, I. P., & Marwan, A. (2022). Penyuluhan Mengenai Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Bagi Pemilih Pemula Di Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Kota Bengkulu. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2), 351. <https://doi.org/10.30595/jppm.v4i2.7337>
- Isdendi, R. R., Soraya, Q. F. E., & Wahyudin, M. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Studi Kasus Di Amik Citra Buana Indonesia. *Jurnal Buana Informatika Cbi*, 13(1), 74-79. <https://doi.org/10.53918/jbicbi.v13i1.82>
- Kurniawan, I., Humaira, H., Akbar, M. R., Mahesa, S., Rahmawati, A., Nafisah, Z., & Muntazhimah, M. (2023). Analisis Bibliometrik Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Berpikir Kritis Matematis Siswa Pada Publikasi Ilmiah Menggunakan VOSviewer. *Jipm (Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika)*, 12(1), 121. <https://doi.org/10.25273/jipm.v12i1.12642>
- Loader, B. D. (2007). *Young citizens in the digital age: Political engagement, young people and new media*. Routledge.
- Lembaga Survei Indonesia, 2024.
- Novianti, N. (2023). *Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula Di Kecamatan Nunukan Selatan*. 2(1), 33-40. <https://doi.org/10.61457/jumpa.v2i1.21>
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, Dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>
- Rinjani. (2022). *Pendidikan Politik Di Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mau57>

Transparency International Indonesia (2023)

Sasana Tunggal, N. (2023). *Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 1(1), 11-15. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>